



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI
KESEHATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Yuli Farianti, M.Epid
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama

dr. Yuli Farianti, M.Epid

		4. Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni	75
		5. Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	75
		6. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	75
		7. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	75
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp 13.318.203.000
2. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp 19.396.841.000
3. Dukman Pelaksanaan Program di BKPK	Rp 5.377.216.000
Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp 38.092.260.000

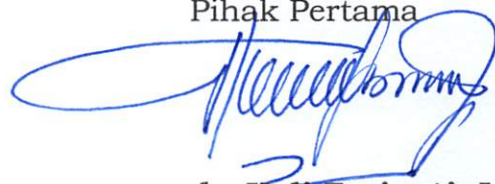
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



dr. Yuli Farianti, M.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI
KESEHATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. <i>Annual review</i> tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)	2
		2. <i>Annual utilization review</i> untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi	20
		3. <i>Annual review</i> terhadap HTA dan rencana implementasinya	1
2.	Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti	1. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		2. Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	80
		5. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50
3	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	60
		2. Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	12
		3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan <i>Provincial Health Account / District Health Account</i> (PHA/DHA)	75